DIKTAT IMPLEMENTASI SISTEM SEIFGARD 2

PELATIHAN PENGURUS DAN PENGAWAS INVENTORI BAHAN NUKLIR



Direktorat Pengembangan Kompetensi dan Direktorat Pengelolaan Fasilitas Ketenaganukliran

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 2023

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	2
BAB II	PROSEDUR REBATCHING ATAU PENAMAAN ULANG	4
2.1	. Rebatching	4
2.2	. Penamaan Ulang	4
BAB III	PERISTIWA DI LUAR KEBIASAAN	5
BAB IV	PERALATAN DAN TEKNIK PENGUKURAN	9
BAB V	PENGUNGKUNG DAN PENGAWASAN	10
5.1	. Pengungkung/Containment	10
5.2	. Pengawasan/Surveillance	11
BAB VI	PEMBEBASAN BAHAN NUKLIR	14
BAB VI	II PENGAKHIRAN DAN PENGHAPUSAN BAHAN NUKLIR	17
8.1	. Pengakhiran	17
8.2	. Prosedur Penghapusan (Deaktivas)	17
DAFTA	R PUSTAKA	19

BAB I PENDAHULUAN

Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (PPBN) atau secara umum disebut dengan *Safeguards System/*Sistem Seifgard merupakan bagian kelengkapan administrasi penting dari suatu operasi fasilitas nuklir. Kelalaian dalam pelaksanaan PPBN oleh suatu fasilitas nuklir berakibat tidak diperolehnya izin pengoperasian, bahkan memiliki dampak lebih luas yaitu sulitnya kesempatan untuk mengadakan kerjasama internasional dalam bidang teknologi nuklir.

Untuk mengontrol penggunaan bahan nuklir secara internasional yang didukung oleh instrumen hukum cukup kuat, digunakan sebagai *Legal basis* dari PPBN yaitu *Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT) yang tertuang di dalam INFCIRC-140, *Safeguards Agreement* dalam mode INFCIRC-153, *Subsidiary Arrangement* model 10 parts serta *Facility Attachment*. Dalam rangka mendukung *Legal basis* ini Indonesia telah menandatangani dan meratifikasi NPT dalam UU No. 8 Tahun 1978, maka sejak itu Indonesia telah terikat secara hukum oleh NPT. Sebagai tindak lanjut diberlakukannya NPT di Indonesia, telah ditandatangani pula *Agreement between the Republic of Indonesia and the International atomic Energy Agency (IAEA) for the application of Safeguards in Connection with the Treaty on Non Proliferation of Nuclear Weapons pada tanggal 14 Juli 1980. Sebagai pedoman pelaksanaan sesuai dengan UU No. 10 tahun 1997 (berdirinya BAPETEN) yaitu SK BAPETEN No.13 tahun 1999 yang telah direvisi menjadi PerKa BAPETEN No. 2 tahun 2005 dan terakhir diubah dengan Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 Tahun 2011 tentang Sistem Seifgard.*

Prosedur akuntansi bahan nuklir yang telah diterima, secara konsisten dijaga oleh operator untuk masing-masing fasilitas. Selanjutnya operator fasiltas melalui BAPETEN melaporkan semua bahan nukilr baik yang diterima maupun dikirim secara detail ke IAEA.

A. Kompetensi Dasar:

Setelah mengikuti materi ini, peserta dapat menerapkan implementasi seifgard lanjutan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian bahan nuklir beserta dokumen dan laporannya pada instalasi nuklir.

B. Indikator Kompetensi:

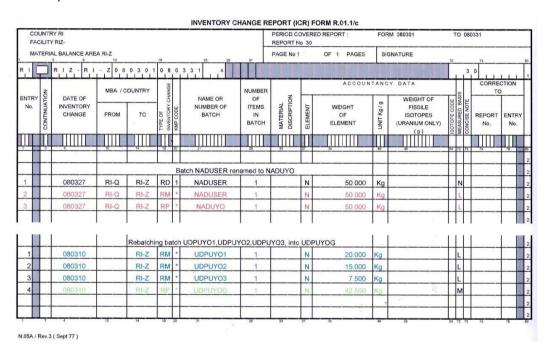
Setelah mengikuti materi ini peserta dapat mengetahui implementasi sistem seifgard, seperti prosedur *rebatching* atau penamaan ulang bahan nuklir, prosedur peristiwa di luar kebiasaan, peralatan dan teknik penentuan inventori, pengungkung dan pengawasan (survailens) untuk bahan nuklir, pembebasan bahan nuklir, prosedur pembebasan dan pengaktifan kembali, dan prosedur pengakhiran dan prosedur penghapusan (deaktivasi) bahan nuklir.

BAB II PROSEDUR *REBATCHING* ATAU PENAMAAN ULANG

2.1. Rebatching

Rebatching dilakukan bila terjadi penggabungan/penyerdehanaan dari beberapa batch menjadi satu batch, atau membuat satu batch menjadi beberapa batch). Kegiatan rebatching harus dilaporkan dengan menggunakan ICR Rebatching. ICR Rebaching ini berisi dua entry baris RM dan RP.

- RM: dilaporkan sebagai batch induk
- RP: dilaporkan sebagai batch turunannya (setelah terjadi perubahan jumlah batch)



Gambar 1. Contoh ICR Rebatching

2.2. Penamaan Ulang

Penamaan ulang bila terjadi perubahan nama (identitas) dari *batch*. Mekanisme pelaporan pada ICR berisi dua *entry* baris RM dan RP dan ini harus dilaporkan sekaligus dalam satu ICR. Karena RM/RP tidak menyatakan perubahan inventori, maka RM/RP tidak dilaporkan dalam MBR

- RM : dilaporkan sebagai nama batch induk (lama)
- RP: dilaporkan sebagai nama batch baru (setelah terjadi perubahan nama batch).

BAB III PERISTIWA DI LUAR KEBIASAAN

Fasilitas nuklir yang mengelola bahan nuklir dan memiliki MBA (*Material Balance Area*) diwajibkan untuk melakukan penerapan Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir (PPBN). Ketika fasilitas/MBA menerapkan PPBN ada dua bagian besar kegiatan atau peristiwa yaitu peristiwa biasa dan peristiwa di luar kebiasaan. Peristiwa biasa yang dimaksud adalah peristiwa yang bersifat biasa/normal yang terjadi pada suatu fasilitas berkaitan dengan kegiatan pengelolaan bahan nuklir diantaranya: penerimaan dan pengiriman bahan nuklir baik internal MBA (antar KMP) maupun eksternal MBA (dalam/luar negeri), perubahan bentuk fisik bahan nuklir, perubahan jumlah item pada suatu *batch*, inventarisasi fisik, inspeksi, dll. Sedangkan peristiwa di luar kebiasaan adalah suatu peristiwa tidak biasa yang terjadi pada MBA yang meliputi:

- a. insiden atau kondisi yang menyebabkan bahan nuklir di MBA hilang dalam jumlah melebihi nilai yang telah ditetapkan di dalam DID;
- b. insiden atau kondisi yang menyebabkan kehilangan bahan nuklir selama pengangkutan;
- c. kerusakan, perusakan, pelepasan segel IAEA tanpa pemberitahuan sebelumnya atau karena keadaan darurat;
- d. pemindahan atau perusakan fungsi alat pengamatan IAEA tanpa izin; dan
- e. kehilangan atau pemalsuan rekaman pembukuan atau rekaman operasi.

 Apabila terjadi salah satu peristiwa di atas maka Pemegang Izin atau personel yang ditunjuk harus mengambil tindakan, yaitu:
 - Melakukan penanganan pertama pada kejadian seperti melokalisir tempat kejadian, mengamankan bukti, dan tindakan lain yang dianggap perlu.
 - Membuat Laporan Khusus yang harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN paling lama 24 (dua puluh empat) jam melalui telefon, faksimili, atau surat elektronik, sejak kejadian diketahui.
 - Membuat Laporan Khusus secara tertulis yang harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari sejak kejadian diketahui.
 Selain laporan khusus, kehilangan akibat kecelakaan juga direkam dan

dilaporkan. Dalam pelaporan, kejadian kehilangan karena kecelakaan mempunyai

kode LA atau *accidental loss*. Kode-kode tersebut dapat dilihat pada *Subsidiary Arrangements* – *Code* 10.

Accidental Loss adalah suatu peristiwa kehilangan sejumlah bahan nuklir secara tidak sengaja yang tidak dapat ditemukan kembali sebagai akibat dari kecelakaaan operasi.

Contoh kasus:

Telah terjadi kecelakaan kimia pada suatu *fumehood* di fasilitas RIW-. Hal tersebut mengakibatkan tumpah dan tercecernya sejumlah larutan bahan nuklir dengan rincian sebagai berikut:

Tag ID	Batch ID	No. of Item	Element (g)	Isotope (g)	Remarks
EC007	STD-05	1	0.065	0.012	Powder
EC013	STD-09	3	0.165	0.033	Solution
EC015	SPFL99	2	0.050	0.010	Solution
EC017	SPFL03	1	0.027	0.005	Solution
Total		7	0.307	0.060	

Status bahan nuklir tersebut masuk dalam inventori di MBA RI-W. Setelah remediasi kecelakaan termasuk dekontaminasi daerah kerja, bahan nuklir tersebut telah bercampur dengan berbagai limbah padat sehingga sangat sulit dan tidak ekonomis untuk diambil kembali.

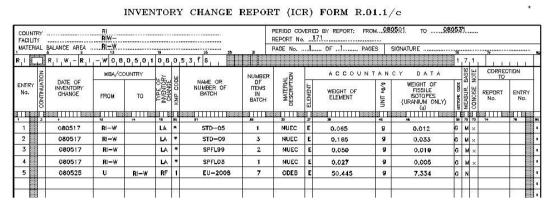
Sesuai sistem seifgard, langkah apa saja yang harus ditempuh oleh Pemegang Izin (PI) atau Petugas Bahan Nuklir dari RIW-?

Jawab

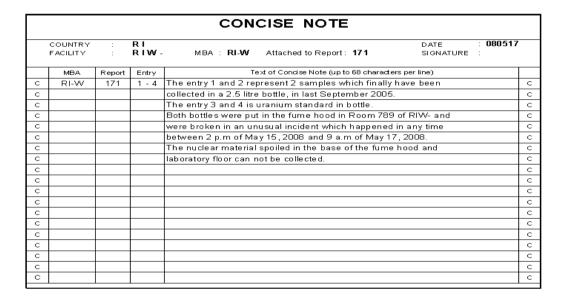
Langkah yang harus dilakukan oleh PIN dari fasilitas RIW- adalah sebagai berikut:

- PI atau yang mewakilinya segera menghubungi BAPETEN (dapat melalui telepon) untuk memberitahukan bahwa telah terjadi kecelakaan (*accident*) yang diduga menyebabkan hilangnya bahan nuklir.
- PI atau yang mewakilinya memuat laporan khusus (laporan khusus telah dijelaskan pada materi implementasi sistem seifgard 1) dengan melampirkan ICD-LA (*Inventory Change Document-Accidental Loss*).
- Dibuat laporan ke IAEA melalui BAPETEN berupa ICR (Gambar 2) dengan lampiran *Concise Note* (Gambar 3).
- Dilakukan pencatatan perubahan inventori pada dokumen Subsidiary Ledger,
 General Ledger dan catatan lain yang diperlukan seperti pada Gambar 4 entri No.2.

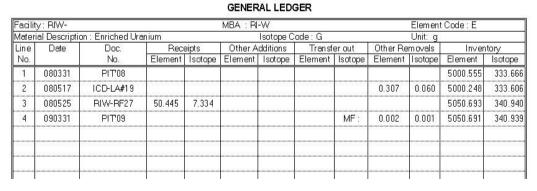
 Saat PIT (*Physical Inventory Taking*) berikutnya, kehilangan bahan nuklir tersebut dimasukkan pada laporan berupa MBR (*Material Balance Report*), lihat Gambar 5.



Gambar 2. Laporan Perubahan Inventori ke IAEA berupa ICR



Gambar 3. Lampiran dari ICR berupa Concise Note



Gambar 4. Catatan pembukuan bahan nuklir berupa General Ledger

COUNTRY BJW-- 4 REPORT No. FACILITY SIGNATURE MATERIAL BALANCE AREA RI-W PAGE No. ..1..... OF2 RIIW = RII = W 01810141011 01910131311RH CORRECTION ACCOUNTANC DATA TO Š WEIGHT OF å ELEMENT UNIT kg/a ENTRY NAME ENTRY CONCISE WEIGHT OF REPORT FISSILE ISOTOPES ENTRY ELEMENT (URANIUM ONLY) No. 3 3 3 . 6 6 6 6 PIB 5| 0| 0| 0| . |5 |5 |5 0|2 E G 5 0 1 4 4 5 1 E 7] . [3 [3 [4]] L A G 0 | 3 01.1310171 01.10161 8 1 $\mathbf{B}_1\mathbf{E}$ 5, 0, 5, 0, , 6, 9, 3 014 g 3 4 0 . 9 4 0 1 0,5 5 0 5 0 6 9 3 3 4 0 . 9 4 0 1 G $P \mid E$ E 5 0 5 0 . 6 9 1 3 4 0 . 9 3 9 1 G 0|6 M, F 01, 10 10 12 1 G 0 . 10 10 11 1 0|7 2,6,6,9, 883

MATERIAL BALANCE REPORT (MBR) FORM R.03

Gambar 5. Laporan inventori akhor ke IAEA berupa MBR

BAB IV PERALATAN DAN TEKNIK PENGUKURAN

Kuantitas Bahan nuklir dalam fasilitas nuklir harus diverifikasi untuk memastikan bahwa pemakaian bahan nuklir sesuai dengan perekaman, pembukuan, dan pelaporan. Beberapa cara verifikasi jumlah bahan nuklir adalah pengukuran dan perhitungan bahan nuklir. Untuk mendapatkan data kuantitas/jumlah dari bahan nuklir yang dimanfaatkan di MBA maka fasilitas harus memiliki peralatan, metode, dan teknik pengukuran bahan nuklir. Teknik pengukuran bahan nuklir meliputi:

- 1. Pengukuran berat (penimbangan)
- 2. Pengukuran Volume
- 3. Analisis dengan cara merusak
- 4. Analisis dengan cara tidak merusak

Fasilitas nuklir reaktor atau MBA reaktor melakukan penentuan jumlah bahan nuklir dengan metode penghitungan. Jumlah bahan nuklir yang terbakar dan plutonium yang terbentuk dengan menggunakan suatu program komputer yang tervalidasi. Laporan perhitungan harus disampaikan ke BAPETEN dengan formulir ICD LN-NP.

BAB V PENGUNGKUNG DAN PENGAWASAN

Dokumen pokok dari *safeguards* IAEA yaitu piagam non proliferasi (NPT) menyatakan bahwa pengungkung dan pengawasan (*Containment and Surveillance* atau biasa disingkat dengan C/S) sebagai suatu tindakan penting dan signifikan untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan SPPBN. Pada awalnya pelaksanaan sistem seifgard tertumpu pada sistem akuntansi saja, namun dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin kompleksnya sistem seifgard, maka sistem C/S terasa sangat dibutuhkan.

Keuntungan penerapan C/S, antara lain:

- Access control untuk menjamin keberadaan bahan nuklir dan tidak adanya undeclared operations.
- Mengurangi frekuensi kegiatan inspeksi untuk melakukan verifikasi.
- Kegiatan inspeksi lebih singkat.
- Memonitor pergerakan bahan nuklir seperti bahan bakar bekas (spent fuels).
- Kemampuan untuk mendeteksi penyimpangan yang tidak dicakup dengan kegiatan verifikasi/ akuntansi bahan nuklir.
- Mengetahui indikasi perusakkan (misalnya segel).

5.1. Pengungkung/Containment

Dalam konteks *safeguards* IAEA, *Containment* didefinisikan sebagai suatu hambatan fisik seperti dinding tembok, kontener, tangki atau pipa untuk menghalangi/mengendalikan pergerakan atau akses ke tempat bahan nuklir. *Containment* dapat mengurangi kemungkinan pergerakan atau perpindahan bahan nuklir secara ilegal.

Peralatan *Containment* yang digunakan dalam akutansi bahan nuklir berupa segel (*seal*) yang berfungsi sebagai jaminan bahwa perubahan bahan nuklir yang disegel dapat dideteksi. Sistem segel yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu segel pasif dan aktif. Segel pasif terdiri dari *metal seal* dan *paper seal*, sedangkan segel aktif terdiri dari *fibre-optic* (COBRA, VACOSS, EOSS) dan *Ultrasonic* (ARC).



Gambar 6. Sistem penyegelan aktif berupa EOSS

5.2. Pengawasan/Surveillance

Surveillance didefinisikan sebagai suatu pengawasan dengan instrumen (kamera, CCTV, dll) atau oleh orang untuk mendeteksi pergerakan/perpindahan bahan nuklir. Penggunaan instrumen sebagai alat surveillance sangat menguntungkan karena dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan inspeksi yaitu berkurangnya frekuensi inspeksi ke lokasi bahan nuklir.

Perangkat *surveillance* dimaksudkan untuk mengindikasikan bahwa tidak ada bahan nuklir tercecer di lokasi tertentu atau memastikan bahwa pemindahan bahan nuklir hanya melalui rute yang benar/legal. Perangkat *surveillance* juga digunakan untuk mengindikasikan apakah integritas pengungkung bahan nuklir (seperti: kontainer, gudang, tangki reaktor, dll) masih terjaga dalam kondisi baik atau sudah rusak.

Dasar dari instrumen *Surveillance* adalah komponen-komponen optik atau elektro-optik. Dengan menggunakan kamera *single system* maupun *multi-system* yang didukung oleh catudaya utama dan dilengkapi beberapa baterai, perpindahan bahan nuklir atau keutuhan *containment* dapat diinformasikan melalui TV pada sistem *Surveillance*. Jumlah data yang dikirimkan dari jarak jauh dapat ditingkatkan melalui modul kamera digital, termasuk sistem keamanan pengiriman dan sistem kehandalan penyimpanan gambar digital.

Sebagai contoh instrumen *Surveillance* yang digunakan di RSG-GAS Serpong adalah peralatan EMOSS (*Multi-Camera Optical Surveillance System*) dan THRPM (*Thermo Hydraulic Reactor Power Monitor*). Peralatan EMOSS terdiri dari 4 (empat) buah kamera dan 2 (dua) buah kabinet EMOSS (EMOSS-1 dan 2), serta 2 (dua) buah box alat yang terpasang di ruang operasi RSG-GAS lantai +13 m. Untuk

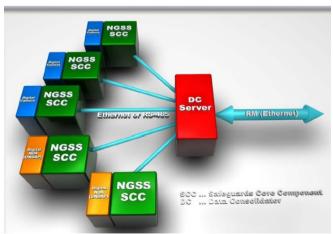
penempatan kamera dan kabinet adalah sebagai berikut : 1 buah kamera bawah air berada yang ditempatkan di kolam bahan bakar bekas dan 1 buah kamera di bawah air teras dihubungkan dengan EMOSS-1. Untuk penempatan 1 buah kamera di lokasi "Cask Transfer Hatch" dan 1 buah kamera untuk lokasi ruang operasi reaktor dihubungkan dengan EMOSS-2.

Kabinet 1 mengambil gambar dari kamera 1 dan 2 secara bergantian dengan interval tertentu dan disimpan di dalam *hard-disk* berkekuatan 1 GB. Sementara kabinet 2 mengambil kamera 3 dan 4 yang dapat menampung gambar dari hasil pemantauan kondisi operasi reaktor selama 3-4 bulan.

Di RSG-GAS juga dipasang peralatan THRPM yang berfungsi untuk mendeteksi adanya produksi plutonium yang sengaja tidak dilaporkan ke IAEA. Hal ini dapat dimungkinkan karena terdapat potensi untuk melakukan iradiasi target U dalam jumlah besar yang mengakibatkan adanya pembangkitan panas dan kenaikan daya secara total. Sehingga jika terjadi suatu peningkatan laju alir dan daya dalam jumlah yang nyata, dapat terjadi penyalah gunaan reaktor untuk maksud-maksud tidak damai.

Dengan adanya THRPM dimaksudkan agar daya reaktor dapat diketahui hingga tingkat akurasi ± 2%, baik pada saat reaktor beroperasi maupun *shutdown*. Pengambilan data yang berupa grafik melalui THRPM dilakukan dengan interval waktu 15 menit yang dapat menyimpan selama 100 hari.

Seiring dengan perkembangan teknologi, maka telah dikembangkan pula sistem *Surveillance* untuk di masa depan yaitu *Next Generation of Surveillance Systems* (NGSS). Dalam sistem ini antara kamera dengan komponen inti yang diamati diintegrasikan.



Gambar 7. Struktur dari NGSS

Keuntungan-keuntungan yang dimiliki oleh sistem NGSS adalah :

- Interval pengambilan gambar mencapai kecepatan 1 gambar/ detik.
- Dukungan gambar dengan resolusi tinggi dan berwarna.
- Menggunakan sistem jaringan (TCP/IP).
- Media penyimpan yang handal dan pemakaian catu daya minimal.
- Lebih tahan terhadap kondisi lingkungan yang keras (harsh), seperti radiasi.
- Kompatibel dengan sistem yang sudah ada DCM-14 (DIS).

BAB VI PEMBEBASAN BAHAN NUKLIR

Bahan nuklir yang dapat dimintakan pembebasan dari seifgard meliputi:

- 1. bahan nuklir yang digunakan dalam orde gram atau kurang sebagai komponen pengindera pada instrumen;
- bahan nuklir yang digunakan pada kegiatan yang tidak terkait daur bahan bakar nuklir; dan
- 3. plutonium dengan konsentrasi isotop plutonium-239 dan plutonium 241 kurang dari 20%.

Permohonan yang diajukan fasilitas untuk pembebasan bahan nuklir harus memuat:

- 1. rincian tujuan penggunaan bahan nuklir setelah lepas dari seifgard;
- 2. rincian perubahan bentuk baik fisik maupun kimia;
- 3. rincian perkiraan kehilangan bahan nuklir selama proses pembebasan; dan
- 4. rincian data-data bahan nuklir yang akan dibebaskan.

Formulir pembebasan bahan nuklir dapat dilihat pada Gambar berikut.

FROM SAFEGUARDS OF NUCLEAR MATERIAL			
Date :			
a) Exemption from safeguards is requested for g/kg total weight, and			
g fissile isotope(s) of(element) under Article			
o) Chemical composition			
Physical form:			
Enrichment or isotopic composition (if applicable):			
c) Material Balance Area (or location) where the nuclear material is now present :			
f) Intended use (only if exemption is sought pursuant to Article 36 (a) or (b) : for			
in			
e) Approximate date of:			
(i) For exemption under Articles 36 (a) and 37 : transfer out of nuclear Material			
Balance Area			
(ii) For exemption under Articles 36 (b): transfer to non-nuclear use			
(signature) (, Indonesia)			
Exemption granted as above Date:			
KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR,			

Gambar 8. Formulir permohonan pembebasan bahan nuklir

Kepala BAPETEN dapat membebaskan bahan nuklir yang terkena seifgard apabila kuantitas seluruh bahan nuklir diIndonesia yang sudah dan akan dibebaskan tidak melebihi:

- 1. seluruhnya satu kilogram (1 kg) bahan nuklir berikut:
 - a. plutonium;
 - b. uranium diperkaya 20% atau lebih, dihitung dengan cara mengalikan beratnya dengan pengayaannya; dan
 - c. uranium diperkaya lebih dari 0,7% sampai dengan kurang dari 20%, dihitung dengan cara mengalikan beratnya dengan lima kali kuadrat pengayaannya.
- 2. sepuluh ton (10 ton) uranium alam dan uranium deplesi dengan pengayaan di atas 0,5%;
- 3. dua puluh ton (20 ton) uranium deplesi dengan pengayaan 0,5% atau lebih rendah; dan
- 4. dua puluh ton (20 ton) torium.

Bahan nuklir yang telah dibebaskan dari seifgard tetap dikenakan pengawasan oleh BAPETEN sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Selanjutnya fasilitas harus memisah antara bahan nuklir terkena seifgard dan bahan nuklir yang dibebaskan dari seifgard.

Bahan nuklir yang telah dibebaskan dari seifgard dapat diaktifkan kembali. Pemegang Izin dapat mengajukan pengaktifan kembali bahan nuklir yang telah dibebaskan kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan formulir pengaktifan kembali seperti pada Gambar 9.

Code 6.3.			
Agreement Reference (Articles)			
36 – 38			
	CAEECHADDC		
RE-APPLICATION OF			
IN RESPECT OF NUCLEAR MATERI	AL PREVIOUSLY EXEMPTED		
	Date :		
a) Safeguards should be re-applied in respec	et of g/kg total weight, and		
g fissile isotope(s) of	(element)		
b) Chemical composition			
Physical form:			
Enrichment or isotopic composition (if applie	cable):		
1 1 1			
c) Material Balance Area (or location) when	e safeguards should be re-applied in		
respect of the nuclear material :			
d) Date from which safeguards should be re-applied :			
e) Exemption from safeguards in respect of	nuclear in question had been granted		
under article			
	(signature)		
	(, Indonesia)		
 a. Safeguards will be re-applied to the nuclear b. For nuclear material which was exempted p 			
now remains exempted under the relevant			
Date :			
	(Signature IAEA)		
KEPAL	A BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.		
KEI AL			
	AS NATIO LASMAN		

Gambar 9. Formulir permohonan pengaktifan kembali bahan nuklir

BAB VIII PENGAKHIRAN DAN PENGHAPUSAN BAHAN NUKLIR

8.1. Pengakhiran

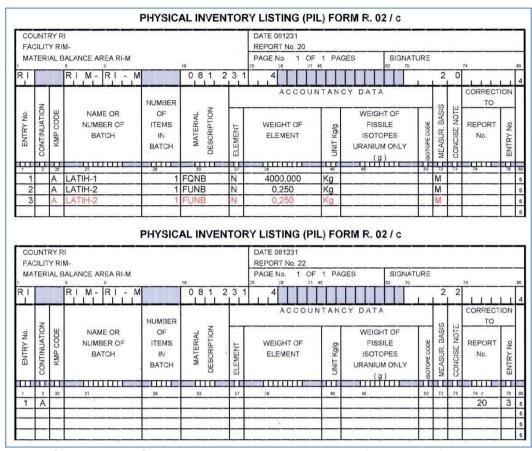
Pemegang Izin dapat meminta pengakhiran bahan nuklir jika bahan nuklir telah digunakan atau telah diencerkan hingga tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan terkait daur bahan bakar nuklir. Selain itu, bahan nuklir yang digunakan untuk kegiatan yang tidak terkait daur bahan bakar nuklir dan secara teknis tidak dapat diambil kembali juga dapat diajukan pengakhirannya.

Permohonan pengakhiran bahan nuklir dari seifgard harus dilengkapi dengan dokumen yang berisi:

- 1. Langkah-langkah pemrosesan terhadap bahan nuklir sebelum pengakhiran bahan nuklir dari seifgard.
- 2. Langkah-langkah pemrosesan selanjutnya setelah pengakhiran bahan nuklir dari seifgard untuk penggunaan kegiatan tidak terkait daur bahan bakar nuklir.

8.2. Prosedur Penghapusan (Deaktivas)

Prosedur penghapusan dilakukan untuk menghapus satu baris entri. Cara penghapusan adalah tulis huruf A atau D pada kolom Continuation dan tulis nomor laporan dan nomor entry pada kolom corection to. Bila bahan nuklir tidak ada di fasilitas pada saat dilakukan PIT, PIL harus disampaikan dengan prosedur A.



Gambar 10. Contoh prosedur penghapusan (deaktivasi)

DAFTAR PUSTAKA

- 1. BAPETEN,"Peraturan Kepala BAPETEN No. 4 tahun 2011", Jakarta.
- IAEA,"The Structure and Content of Agreements Required in Connection with The Treaty on The Non Proliferation of Nuclear Weapons", INFCRC/153 (Corrected).
- 3. IAEA, "Code 10 of Subsidiary Arrangement".
- 4. IAEA BULLETIN Volume 19 No. 5
- 5. YUWONO, I,"Dasar Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir", Pusdiklat-Jakarta, 2001.
- M. ZENDEL.,"IAEA Safeguards Equipment", JAEA-IAEA Workshop on Advanced SafeguardsTechnology for the Nuclear Fuel Cycle, Tokai-Mura, Japan, 2007.
- 7. SIHOMBING, E, dkk, "Pelaksanaan SPPBN di RSG GAS dari tahun 1997 s/d 2006", Workshop SPPBN, BAPETEN, Jakarta, 2007.